BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Prinsip transparansi (keterbukaan) belum diterapkan dengan menyeluruh oleh pengurus KMK St. Patrisius, pengurus hanya berfokus pada keterbukaan informasi kegiatan yang mereka laksanakan Tetapi pengurus belum melakukan dengan baik pada keterbukaan informasi anggaran.
2. Prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) sudah terlaksana dengan baik dalam kepengurusan KMK St. Patrisius, pada setiap kegiatan pengurus akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada birokrasi kampus sesuai dengan pedoman dan waktu yang ditentukan.
3. Pengurus selalu berupaya dalam keterlibatan aktif anggota, hal ini selalu dilakukan dengan berbagai media untuk memwadahi partisipasi anggota dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan.
4. Pengurus mempunyai visi untuk menjadikan KMK St. Patrisius sebagai rumah yang nyaman untuk berkembang dengan berlandaskan kasih kekeluargaan melalui pelayanan kepada sesama. Implementasi visi ini dapat dilihat dari beberapa program kerja sosial dan program kerja yang mendukung minat serta bakat anggota.

5. Evaluasi selalu diadakan oleh pengurus setiap kegiatan telah selesai dilaksanakan yang dapat diikuti oleh panitia dan anggota, lalu untuk evaluasi kepengurusan hanya diikuti oleh pengurus saja. Sikap responsif pengurus juga belum dirasakan beberapa anggota, mereka merasa evaluasi hanya menjadi formalitas karena tidak ada perubahan nyata.
6. Pencatatan laporan keuangan KMK St. Patrisius tidak berpedoman pada ISAK 335 dan pihak birokrasi kampus tidak mempunyai standar khusus untuk pencatatan laporan keuangan Unit Kegiatan Mahasiswa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan sebelumnya serta pengalaman selama proses penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi Birokrasi Universitas

Pihak birokrasi maupun Kasubag Kemahasiswaan yang berhubungan langsung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa diharap bisa memperjelas mengenai prosedur penyerahan dokumen tertentu, memberikan waktu lebih bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan memberikan kejelasan terkait bantuan anggaran yang diberikan kampus serta pengadaan fasilitas guna mempermudah perencanaan anggaran organisasi.

2. Bagi Dosen Pembina KMK St. Patrisius

Dosen pembina diharapkan bisa lebih menjembatani komunikasi antara pengurus dengan pihak birokrasi kampus untuk mendapatkan kejelasan dari masalah-masalah yang dihadapi. Dosen pembina juga bisa memberikan dorongan bagi pengurus untuk melakukan keterbukaan anggaran kepada anggota serta melakukan monitoring secara berkala dan membantuk pengurus mempertahankan tata kelola yang baik di organisasi.

3. Badan Pengurus Inti KMK St. Patrisius

Selaku pengambil keputusan dan kebijakan dalam organisasi, BPH harus bisa lebih bersikap responsif atas semua kritik dan saran yang diberikan dan memberikan perubahan nyata untuk keberlanjutan organisasi. Pengurus juga bisa menyediakan media informasi lebih untuk keterbukaan anggaran maupun kegiatan agar anggota juga bisa memonitoring dan memberikan saran mengenai hal tersebut agar visi strategis dapat selalu diwujudkan dengan nyata dalam organisasi.

4. Bagi Anggota KMK St. Patrisius

Anggota KMK St. Patrisius berhak mendapatkan segala bentuk informasi kegiatan dan perencanaan anggaran organisasi dan ajakan untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Tetapi, anggota juga mempunyai kewajiban untuk berperan secara aktif atas segala wadah yang telah diciptakan oleh pengurus untuk keterlibatan mereka agar pencapaian tujuan organisasi bisa diwujudkan secara bersama-sama.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, baik dari segi jumlah maupun keragaman organisasi nirlaba yang diteliti. Peneliti dapat menelusuri lebih dalam mengenai dampak penerapan *good governance* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan organisasi serta urgensi penggunaan ISAK 335 dan mendalami pemahaman mengenai standar penyajian laporan keuangan bagi organisasi nirlaba.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Validitas data sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran informan dalam memberikan informasi sehingga memengaruhi kedalaman dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam konteks penerapan ISAK 35, pendekatan kualitatif memiliki keterbatasan dalam mengukur secara objektif tingkat kepatuhan organisasi terhadap standar tersebut. Interpretasi data sangat dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, dan sudut pandang peneliti sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam proses analisis. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan dua proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber yang dilakukan dengan memeriksa kebenaran data dari berbagai informan serta triangulasi metode yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh peneliti.